No. Katalog: 4102002.3306

# INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

## KABUPATEN PURWOREJO

## 2021

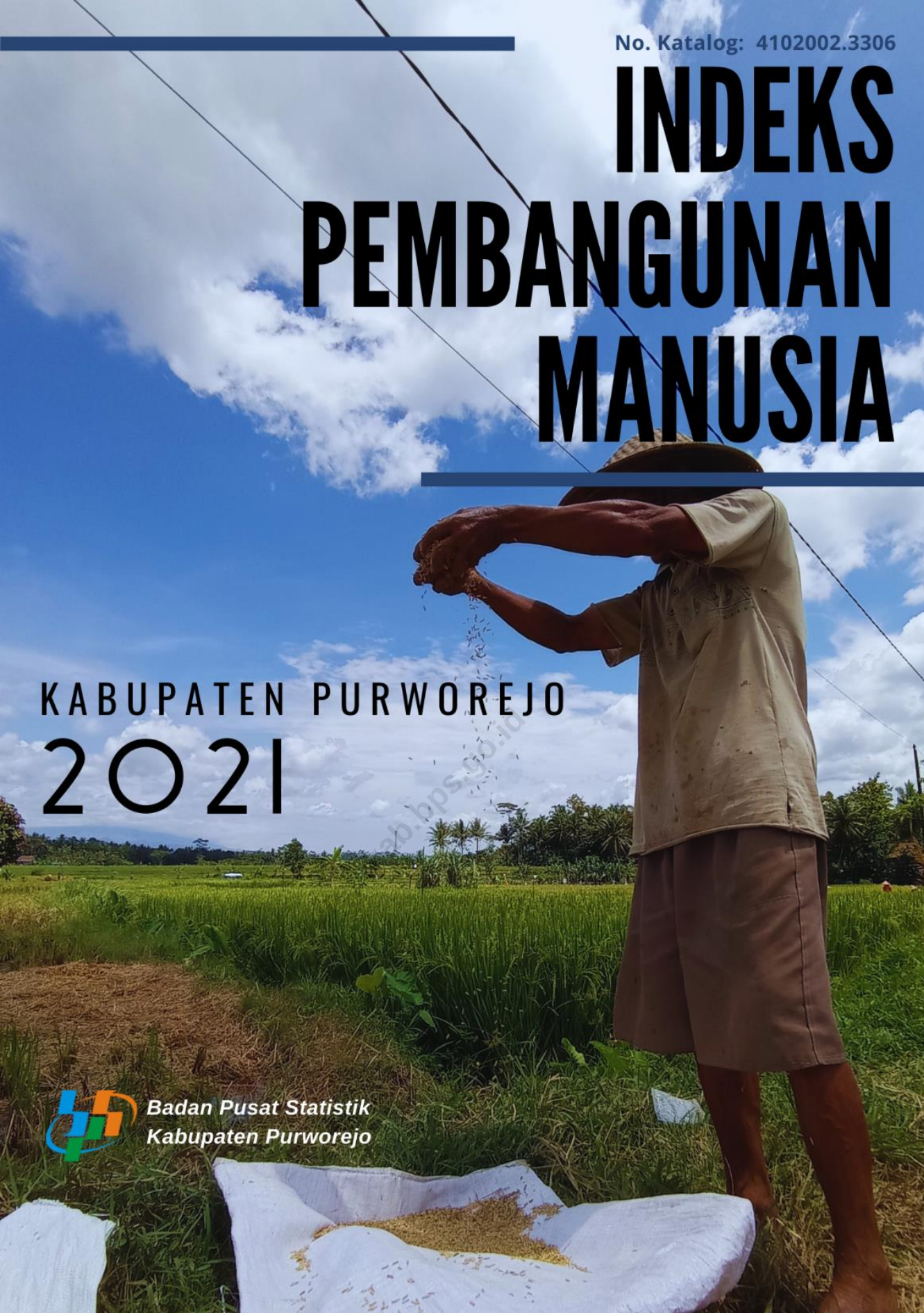

Badan Pusat Statistik
Kabupaten Purworejo

# INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

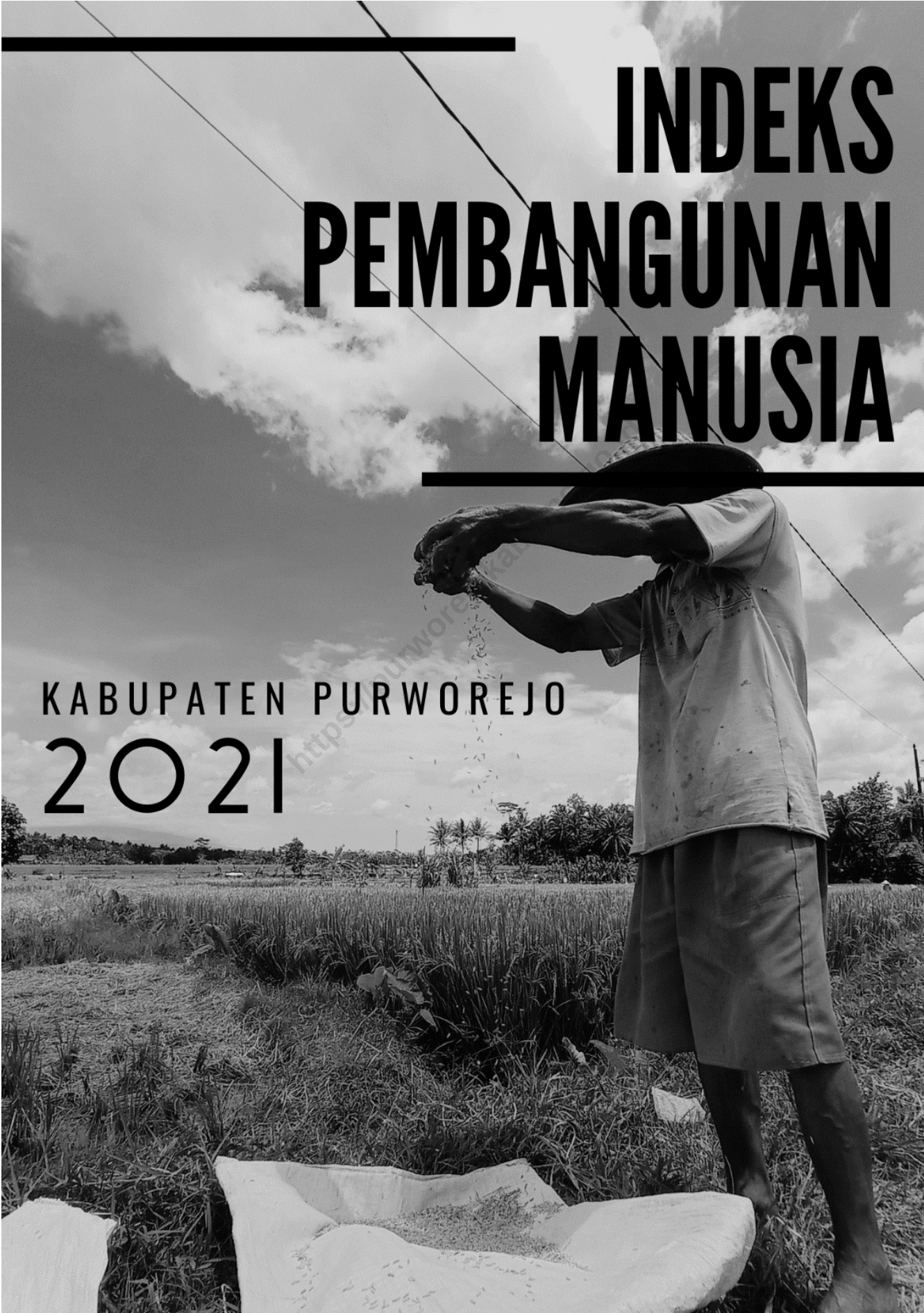

KABUPATEN PURWOREJO

2021

# INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN PURWOREJO

# 2021

**ISBN :**
**No. Publikasi : 33060.2128**
**Katalog BPS : 4102002.3306**

**Ukuran Buku : 17,6 cm x 25 cm**
**Jumlah Halaman : xi + 48 halaman**

**Naskah :**
**Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo**

**Penyunting :**
**Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo**

**Gambar Kulit :**
**Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo**

**Diterbitkan oleh :**
**©Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo**

**Infografis dan ikon diambil dari : *www.freepik.com*, *www.canva.com*, *www.icons-icons.com***
**Credit Foto: Ajie Setya Kurniawan, BPS Kabupaten Purworejo**

**Dicetak oleh :**
**CV Berguna**

***Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik***

https://purworejokab.bps.go.id

# TIM PENYUSUN

**Penanggung jawab:**
R. Bagus Rahmat Susanto, S.Si.

**Penyunting:**
Arif Soesilo, SST

**Penulis:**
Visita Arsa Pratiwi, SST

**Pengolah data:**
BPS RI

**Pembuat Infografis:**
Visita Arsa Pratiwi, SST

https://purworejokab.bps.go.id

https://purworejokab.bps.go.id

# Kata Pengantar

Indeks Pembangunan Manusia sebagai indikator ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan yang dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan penghidupan yang layak. Semua indikator yang merepresentasikan ketiga dimensi ini terangkum dalam satu nilai tunggal, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Publikasi ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai pembangunan manusia Kabupaten Purworejo. Selain itu, dapat juga dilihat capaian pembangunan manusia Kabupaten Purworejo dari masing-masing dimensi.

Semoga publikasi capaian pembangunan manusia Kabupaten Purworejo yang berjudul "Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Purworejo 2021" ini bermanfaat bagi semua kalangan yang berkepentingan, termasuk masyarakat pengguna sebagai bahan rujukan. Ucapan terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak yang telah memberikan saran dan masukan untuk perbaikan publikasi ini.

Purworejo, Desember 2021
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Purworejo

**R. Bagus Rahmat Susanto, S.Si.**

https://purworejokab.bps.go.id

# Daftar Isi


Halaman

**Kata Pengantar** ..... v

**Daftar Isi** ..... vii

**Daftar Gambar/ Grafik** ..... ix

**Daftar Lampiran** ..... xi

**Konsep dan Pengukuran Pembangunan Manusia** ..... 1

Konsep Dasar Pembangunan Manusia ..... 1

Pengukuran Pembangunan Manusia ..... 2

**Status Pembangunan Manusia Kabupaten Purworejo** ..... 15

**Pencapaian Pembangunan Manusia Kabupaten Purworejo** ..... 27

**Kesenjangan Antarwilayah Eks Karesidenan Kedu** ..... 33

Kesenjangan Pembangunan Manusia ..... 33

Kesenjangan Kesehatan Manusia ..... 34

Kesenjangan Pendidikan ..... 36

Kesenjangan Pengeluaran per Kapita ..... 38

**Kesimpulan** ..... 43


https://purworejo.kab.bps.go.id

https://purworejokab.bps.go.id

# Daftar Gambar/ Grafik

Halaman


Gambar 1. Perjalanan Metodologi Penghitungan IPM di UNDP ..... 3
Gambar 2. Perbedaan Indikator Metode Lama dan Metode Baru UNDP ..... 6
Grafik 3. IPM Kabupaten Purworejo dan Komponen, 2021 ..... 16
Grafik 4. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Purworejo, 2012-2021 ..... 17
Grafik 5. Angka Harapan Hidup Saat Lahir Kabupaten Purworejo, 2012-2021 (Tahun) ..... 20
Grafik 6. Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Purworejo, 2012-2021 (Tahun) ..... 21
Grafik 7. Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan Kabupaten Purworejo, 2012-2021 (Ribu Rupiah/Tahun) ..... 23
Grafik 8. Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Purworejo dan Provinsi Jawa Tengah, 2012-2021 ..... 27
Grafik 9. Angka Harapan Hidup Bayi Saat Lahir Kabupaten Purworejo dan Provinsi Jawa Tengah, 2012-2021 (Tahun) ..... 28
Grafik 10. Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Purworejo dan Provinsi Jawa Tengah, 2012-2021 (Tahun) ..... 29
Grafik 11. Pengeluaran per Kapita per Tahun Penduduk Kabupaten Purworejo dan Provinsi Jawa Tengah, 2012-2021 (Ribu Rupiah) ..... 30
Grafik 12. Perkembangan Selisih IPM Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Kedu yang Tertinggi dan Terendah, 2012-2021 ..... 34
Grafik 13. Perkembangan Selisih Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Kedu yang Tertinggi dan Terendah, 2012-2021 (Tahun) ..... 35
Grafik 14. Perkembangan Selisih Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Kedu yang Tertinggi dan Terendah, 2012-2021 ..... 37


https://purworejokab.bps.go.id

Grafik 15. Perkembangan Selisih Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Kedu yang Tertinggi dan Terendah, 2012-2021 (Tahun) ..... 37
Grafik 16. Perkembangan Selisih Pengeluaran per Kapita per Tahun Kabupaten/Kota Wilayah Eks Karesidenan Kedu yang Tertinggi dan Terendah, 2012-2021 (Juta Rupiah) ..... 39

https://purworejokab.bps.go.id

# Daftar Lampiran

Halaman


Lampiran 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Komponen Pembentuknya Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, 2020 – 2021 ..... 46

Lampiran 2. Komoditi Kebutuhan Pokok sebagai Dasar Penghitungan Daya Beli (PPP) ..... 47

Lampiran 3. Nilai Maksimum dan Minimum dari Setiap Komponen IPM ... 48


https://purworejokab.bps.go.id

https://purworejokab.bps.go.id

# Pembangunan Manusia

Ide dasar pembangunan manusia itu sendiri adalah tumbuhnya bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lingkungan, serta perubahan dalam kesejahteraan manusianya

Pendekatan pembangunan manusia lebih memfokuskan kepada perluasan pilihan masyarakat kepada perluasan pilihan masyarakat untuk hidup dengan bebas dan bermartabat

Indikator penyusun IPM:
Umur Harapan Hidup atau UHH
Harapan Lama Sekolah atau HLS
Rata-rata Lama Sekolah atau RLS
dan
Pengeluaran perkapita pertahun yang disesuaikan

Tahun 2014, UNDP melakukan perubahan perhitungan IPM. perubahan metode perhitungan karena beberapa indikator dinilai sudah tidak tepat dan rata-rata aritmatik memungkinkan tidak terjadi ketimpangan hasil

https://purworejokab.bps.go.id

*Badan Pusat Statistik*
*Kabupaten Purworejo*

https://purworejokab.bps.go.id

# Konsep dan Pengukuran Pembangunan Manusia

## Konsep Dasar Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia hakikatnya memiliki makna yang luas. Namun, ide dasar pembangunan manusia itu sendiri yaitu pertumbuhan positif dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lingkungan, serta perubahan dalam kesejahteraan manusianya. Ide dasar ini memiliki fokus kepada manusia dan kesejahteraannya. *United Nations Development Programme* (UNDP) menempatkan manusia sebagai kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Oleh karena itu, tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Hal ini tampaknya merupakan suatu kenyataan yang sederhana. Namun, hal ini seringkali terlupakan oleh berbagai kesibukan jangka pendek untuk mengumpulkan harta dan uang (*Human Development Report* 1990).

Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif

https://purwarejokab.bps.go.id

Konsep pembangunan dan pembangunan manusia cukup berbeda. Dalam sudut pandang konvensional, pembangunan memiliki fokus utama pada pertumbuhan ekonomi, pembentukan modal manusia, pembangunan sumber daya manusia, kesejahteraan rakyat, dan pemenuhan kebutuhan dasar. Model 'pertumbuhan ekonomi' lebih menekankan pada peningkatan pendapatan daripada memperbaiki kualitas hidup manusia. 'Pembangunan sumber daya manusia' cenderung untuk memperlakukan manusia sebagai input dari proses produksi dan sebagai alat, bukan sebagai tujuan akhir.

Pendekatan 'kesejahteraan' melihat manusia sebagai penerima dan bukan sebagai agen dari perubahan dalam proses pembangunan. Adapun pendekatan 'kebutuhan dasar' terfokus pada penyediaan barang-barang dan jasa-jasa untuk kelompok masyarakat tertinggal, bukannya memperluas pilihan yang dimiliki manusia di segala bidang.

Pendekatan pembangunan manusia lebih memfokuskan kepada perluasan pilihan masyarakat untuk hidup dengan bebas dan bermartabat. Pembangunan manusia melihat secara bersamaan semua isu dalam masyarakat yaitu pertumbuhan ekonomi, perdagangan, ketenagakerjaan, kebebasan politik ataupun nilai-nilai kultural, yang dilihat dari sudut pandang manusia. Pembangunan manusia juga mencakup isu penting lainnya, yaitu gender. Dengan demikian, pembangunan manusia tidak hanya memperhatikan sektor sosial, tetapi merupakan pendekatan yang komprehensif dari semua sektor.

## Pengukuran Pembangunan Manusia

### Perjalanan Penghitungan IPM

Pembangunan manusia menggunakan pengukuran yang sudah dikenalkan oleh UNDP pada tahun 1990, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada *Human Development Report* 1990 diperkenalkan IPM sebagai indeks komposit yang dihitung melalui pendekatan dimensi umur panjang dan hidup sehat yang diproksi dengan angka harapan hidup saat lahir, dimensi pengetahuan diproksi dengan angka melek umur dewasa, serta dimensi standar hidup layak yang diproksi dengan PDB per kapita. Untuk menghitung ketiga dimensi menjadi sebuah indeks komposit, digunakan rata-rata aritmatik.

Setahun berselang, UNDP melakukan penyempurnaan penghitungan IPM dengan menambahkan variabel rata-rata lama sekolah ke dalam dimensi pengetahuan. Akhirnya terdapat dua indikator dalam dimensi pengetahuan yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. UNDP memberi bobot untuk kedua indikator dalam dimensi pengetahuan tersebut. Namun akhirnya, pada tahun 1995, UNDP kembali melakukan penyempurnaan metode penghitungan IPM. Kali ini, UNDP mengganti variabel rata-rata lama sekolah menjadi gabungan angka partisipasi kasar. Pembobotan tetap dilakukan

https://purworejokab.bps.go.id

dengan metode yang sama seperti sebelumnya. Indikator angka melek huruf diberi bobot dua per tiga, sementara indikator rata-rata lama sekolah diberi bobot sepertiga. Keempat indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM masih cukup relevan hingga tahun 2014.

**Gambar 1. Perjalanan Metodologi Penghitungan IPM di UNDP**

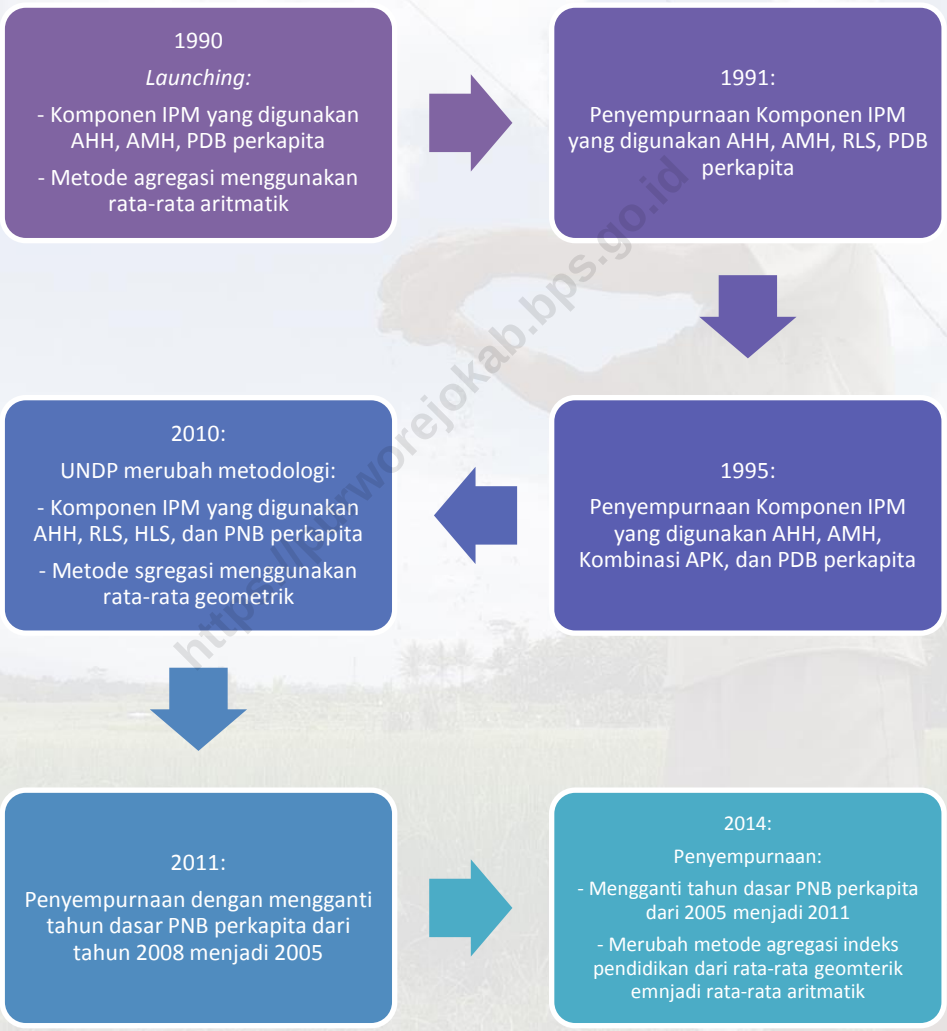


Pada tahun 2010, UNDP merubah metodologi penghitungan IPM. Kali ini perubahan drastis terjadi pada penghitungan IPM. UNDP menyebut perubahan yang dilakukan pada penghitungan IPM sebagai metode baru.

https://purworejokab.bps.go.id

Beberapa indikator diganti menjadi lebih relevan. Indikator Angka Partisipasi Kasar Gabungan (*Combine Gross Enrollment Ratio*) diganti dengan indikator Harapan Lama Sekolah (*Expected Years of Schooling*). Indikator Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Selain itu, cara penghitungan juga ikut berubah. Metode rata-rata aritmatik diganti menjadi rata-rata geometrik untuk menghitung indeks komposit.

Perubahan yang dilakukan UNDP tidak sebatas itu. Setahun kemudian, UNDP menyempurnakan penghitungan metode baru. UNDP merubah tahun dasar penghitungan PNB per kapita dari 2008 menjadi 2005. Perubahan tahun dasar oleh UNDP ini diindikasi akibat dari kondisi ekonomi global di tahun 2008 yang tidak stabil akibat krisis di pasar keuangan Amerika Serikat. Tiga tahun berselang, UNDP melakukan penyempurnaan kembali penghitungan metode baru. Kali ini, UNDP merubah metode agregasi indeks pendidikan dari rata-rata geometrik menjadi rata-rata aritmatik dan tahun dasar PNB per kapita. Serangkaian perubahan yang dilakukan UNDP bertujuan agar dapat membuat suatu indeks komposit yang cukup relevan dalam mengukur pembangunan manusia.

https://purworejokab.go.id

## Mengapa Metodologi Penghitungan IPM Dirubah?

Pada dasarnya, perubahan metodologi penghitungan IPM didasarkan pada alasan yang cukup rasional. Suatu indeks komposit harus mampu mengukur apa yang diukur. Dengan pemilihan metode dan variabel yang tepat, indeks yang dihasilkan akan cukup relevan. Namun, alasan utama yang dijadikan dasar perubahan metodologi penghitungan IPM setidaknya ada dua hal mendasar.

"Alasan pertama perubahan metodologi IPM adalah beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM.

Alasan kedua karena kelemahan rata-rata aritmatik yang memungkinkan transfer nilai capaian"

**Pertama,** beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan

IPM. Angka Melek Huruf (AMH) sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Sebelum penghitungan metode baru digunakan, AMH di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antarwilayah dengan baik. Dalam konsep pembentukan indeks komposit, variabel yang tidak sensitif membedakan akan menyebabkan indikator komposit menjadi tidak relevan. Oleh karena itu, indikator AMH dianggap sudah tidak relevan sebagai komponen dalam penghitungan IPM.

**Kedua,** penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain. Pada dasarnya, konsep yang diusung dalam pembangunan manusia adalah pemerataan pembangunan dan sangat anti terhadap ketimpangan pembangunan. Rata-rata aritmatik memungkinkan adanya transfer capaian dari dimensi dengan capaian tinggi ke dimensi dengan capaian rendah. Dengan kata lain, rata-rata aritmatik menyebabkan seolah-olah tidak terjadi ketimpangan karena hasil dapat ditutupi oleh dimensi lain yang lebih tinggi capaiannya. Kelemahan rata-rata aritmatik ini menjadi salah satu alasan mendasar untuk memperbarui metode penghitungan IPM.

## Apa Saja Yang Berubah?

UNDP memperkenalkan penghitungan metode baru dengan beberapa perbedaan mendasar dibanding metode lama. Setidaknya, terdapat dua hal mendasar dalam perubahan metode baru ini. Kedua hal mendasar terdapat pada aspek indikator dan cara penghitungan indeks.

Pada metode baru, UNDP memperkenalkan indikator baru pada dimensi pengetahuan yaitu Harapan lama Sekolah (*Expected Years of Schooling*). Indikator ini digunakan untuk menggantikan indikator AMH yang memang saat ini sudah tidak relevan karena capaian di banyak Negara sudah sangat tinggi. UNDP juga menggunakan indikator PNB per kapita untuk menggantikan indikator PDB per kapita.

**Gambar 2. Perbedaan Indikator Metode Lama dan Metode Baru UNDP**

| Dimensi | Metode Lama | Metode Baru |
|---|---|---|
| **Umur Panjang dan Hidup Sehat** | Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH) | Angka/ Umur Harapan Hidup Saat Lahir (AHH/ UHH) |
| **Pengetahuan** | Angka Melek Huruf (AMH), Kombinasi Angka Partisipasi Kasar (APK) | Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) |
| **Standar Hidup Layak** | PDB perkapita | PNB perkapita |
| **Agregasi** | Rata-rata Aritmatik | Rata-rata Geometrik |

Selain indikator baru, UNDP melakukan perubahan cara penghitungan indeks. Untuk menghitung agregasi indeks, digunakan rata-rata geomatrik (*geometric mean*). Cara penghitungan indeks yang terbilang baru ini cenderung sensitif terhadap ketimpangan. Tidak seperti rata-rata artimatik yang dapat menutupi ketimpangan yang terjadi antardimensi, rata-rata geometrik menuntut keseimbangan ketiga dimensi IPM agar capaian IPM menjadi optimal.

### Bagaimana Dampaknya?

Perubahan mendasar yang terjadi pada penghitungan IPM tentunya membawa dampak. Secara langsung, ada dua dampak yang terjadi akibat perubahan metode penghitungan IPM.

**Pertama,** perubahan level IPM. Secara umum, level IPM metode baru lebih rendah dibanding IPM metode lama. Hal ini terjadi karena perubahan indikator dan perubahan cara penghitungan. Penggantian indikator Angka Melek Huruf (AMH) menjadi Harapan Lama Sekolah (HLS) membuat angka IPM lebih rendah karena secara umum AMH sudah di atas 90 persen sementara HLS belum cukup optimal. Selain itu, perubahan rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik turut andil dalam penurunan level IPM metode baru. Ketimpangan yang terjadi antardimensi akan mengakibatkan capaian IPM menjadi rendah.

**Kedua,** terjadi perubahan peringkat IPM. Perubahan indikator dan cara penghitungan membawa dampak pada perubahan peringkat IPM. Perubahan indikator berdampak pada perubahan indeks dimensi. Sementara perubahan cara penghitungan berdampak signifikan terhadap agregasi indeks. Namun, perlu dicatat bahwa peringkat IPM antara kedua metode tidak dapat dibandingkan karena kedua metode tidak sama.

## Implementasi IPM Metode Baru di Indonesia

Pada tahun 2014, Indonesia secara resmi melakukan penghitungan IPM dengan metode baru. Untuk mengaplikasikan metode baru tersebut, sumber data yang tersedia di Indonesia antara lain :

- Angka harapan hidup saat lahir (Sensus Penduduk 2010 / SP2010, Proyeksi Penduduk)
- Angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah (Survei Sosial Ekonomi Nasional / SUSENAS)
- PNB per kapita tidak tersedia pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sehingga diproksi dengan pengeluaran per kapita disesuaikan menggunakan data SUSENAS.

Selain sumber utama tersebut, digunakan juga data pendukung seperti inflasi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pertumbuhan ekonomi dan indikator sosial ekonomi lainnya. Selain itu, Indonesia juga melakukan penyesuaian terhadap metode baru yaitu pada indikator PNB per kapita karena ketersediaan data. Dari empat indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM metode baru, tiga diantaranya sama persis dengan UNDP. Khusus untuk PNB per kapita, indikator ini diproksi dengan pengeluaran per kapita.

**Variabel Pembentuk IPM:**

1. Angka/ Umur Harapan Hidup saat Lahir (AHH/ UHH)
2. Tingkat pendidikan (Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah)
3. Standar Hidup Layak (Rata-rata pengeluaran perkapita riil)

Dalam proses penghitungan IPM dan komponennya, digunakan variabel-variabel sebagai berikut :

1. Umur Harapan Hidup (AHH) saat Lahir

   AHH yang merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat

ditempuh oleh seseorang selama hidup. Perhitungan AHH melalui pendekatan tidak langsung (*indirect estimation*). Jenis data yang digunakan adalah Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Paket program *Micro Computer Program For Demographic Analysis* (MCPDA) atau *Mortpack* digunakan untuk menghitung angka harapan hidup berdasarkan input data ALH dan AMH. Selanjutnya dipilih metode *Trussel* dengan model *West*, yang sesuai dengan histori kependudukan dan kondisi Indonesia dan Negara-negara Asia Tenggara umumnya (Preston, 2004 dalam BPS, 2016).

Indeks harapan hidup dihitung dengan menghitung nilai maksimum dan nilai minimum harapan hidup sesuai standar UNDP, yaitu angka tertinggi sebagai batas atas untuk penghitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah adalah 20 tahun.

2. Tingkat Pendidikan

Salah satu komponen pembentuk IPM adalah dari dimensi pengetahuan yang diukur melalui tingkat pendidikan. Dalam hal ini, indikator yang digunakan adalah rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) dan harapan lama sekolah (*expected years of schooling*). Pada proses pembentukan IPM, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah diberi bobot yang sama, kemudian penggabungan kedua indikator ini digunakan sebagai indeks pendidikan sebagai salah satu komponen pembentuk IPM.

Rata-rata lama sekolah (RLS) menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Penghitungan rata-rata lama sekolah menggunakan dua batasan yang dipakai sesuai kesepakatan UNDP. Rata-rata lama sekolah memiliki batas maksimumnya 15 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun.

$$RLS = \frac{1}{n} x \sum_{i=1}^{n} x_i$$

dimana,

RLS = Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas

$x_i$ = Lama sekolah penduduk ke-i yang berusia 25 tahun ke atas

$n$ = Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas

Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di

masa mendatang. HLS dihitung untuk penduduk usia 7 tahun ke atas karena disesuaikan dengan program wajib belajar 9 tahun yang dimulai pada usia 7 tahun. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Seperti halnya rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah juga menggunakan batasan yang dipakai sesuai kesepakatan UNDP. Batas maksimum untuk harapan lama sekolah adalah 18 tahun, sedangkan batas minimumnya 0 (nol). Variabel yang digunakan dalam penghitungan HLS adalah partisipasi sekolah penduduk menurut kelompok umur. Formula yang digunakan untuk menghitung HLS yaitu:

$$EYS_a^t = \sum_{i=a}^{n} \frac{E_i^t}{P_i^t} \qquad (1)$$

dimana,

$EYS_a^t$ = Harapan Lama Sekolah pada umur *a* di tahun *t*

$E_i^t$ = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t

$P_i^t$ = Jumlah penduduk usia i pada tahun t

= Usia (a, a+1, ..., n).

3. Standar Hidup Layak

Dimensi lain dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak. Dalam cakupan lebih luas, standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan paritas daya beli (*purcashing power parity*). Dalam penghitungan standar hidup layak dgunakan pengeluaran per kapita yang disesuaikan, dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$PPP_j = \prod_{i=1}^{m} \left( \frac{p_{ij}}{p_{ik}} \right)^{1/m} \qquad (2)$$

$$PPP_j = \prod_{i=1}^{m} \left( \frac{p_{ij}}{p_{ik}} \right)^{1/m} \qquad (2)$$

$PPP_j$ = paritas daya beli di wilayah *j*

$p_{ik}$ = harga komoditas i di Jakarta Selatan

$p_{ij}$ = harga komoditas i di kab/kota j

m = jumlah komoditas

Penghitungan paritas daya beli dilakukan berdasarkan 96 komoditas kebutuhan pokok seperti terlihat dalam Tabel Lampiran 2. Batas maksimum dan minimum penghitungan pengeluaran per kapita yang digunakan dalam penghitungan IPM seperti terlihat dalam Tabel Lampiran 3. Batas maksimum pengeluaran per kapita adalah sebesar Rp 26.572.352 sementara batas minimumnya adalah Rp 1.007.436.

## Penyusunan Indeks IPM

Sebelum menghitung IPM, setiap komponen IPM harus dihitung indeksnya. Formula yang digunakan dalam penghitungan indeks komponen IPM adalah sebagai berikut:

$$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}} \quad (3)$$

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}} \quad (4)$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}} \quad (5)$$

$$I_{pengetahuan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2} \quad (6)$$

$$I_{pendapatan} = \frac{\ln(pendapatan) - \ln(pendapatan_{min})}{\ln(pendapatan_{maks}) - \ln(pendapatan_{min})} \quad (7)$$

Untuk menghitung indeks masing-masing komponen IPM digunakan batas maksimum dan minimum seperti terlihat dalam Tabel Lampiran 4. Selanjutnya IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari ketiga indeks tersebut :

https://purworejokab.bps.go.id

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \text{ x } I_{pendidikan} \text{ x } I_{pengeluaran}} \qquad (8)$$

## Status Pembangunan Manusia

Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok. Pengelompokkan ini bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam dalam hal pembangunan manusia.

1. Kelompok "sangat tinggi" : IPM ≥ 80
2. Kelompok "tinggi" : 70 ≤ IPM < 80
3. Kelompok "sedang" : 60 ≤ IPM < 70
4. Kelompok "rendah" : IPM < 60

## Pertumbuhan IPM

Untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan ukuran pertumbuhan per tahun. Pertumbuhan IPM menunjukkan perbandingan antara perubahan capaian terkini dengan capaian tahun sebelumnya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan IPM, maka semakin cepat pula peningkatan IPM. Indikator pertumbuhan IPM ini dapat digunakan sebagai kinerja pembangunan manusia suatu wilayah pada kurun waktu tertentu.

$$r = \left[ \frac{IPM_n - IPM_{n-1}}{IPM_{n-1}} \right] \text{ x } 100\% \qquad (9)$$

Keterangan:

$r$ = Pertumbuhan IPM
$IPM_n$ = IPM tahun ke-n
$IPM_{n-1}$ = IPM tahun ke-(n-1)

https://purworejo.kab.go.id

https://purworejokab.bps.go.id

# Pembangunan Manusia

## Kabupaten Purworejo Tahun 2021

### Dimensi Kesehatan

Umur Harapan Hidup atau UHH Kabupaten Purworejo pada tahun 2021 adalah sebesar 74,87 tahun.

### Dimensi Pendidikan

Dimensi pendidikan diwakili oleh indikator Harapan Lama Sekolah atau HLS dan Rata-rata Lama Sekolah atau RLS. Pada tahun 2021, Harapan Lama Sekolah Kabupaten Purworejo sebesar 13,51 tahun. Sementara angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Purworejo pada tahun yang sama adalah sebesar 8,21 tahun.

### Dimensi Standar Hidup Layak

Dimensi ini diwakili oleh pengeluaran perkapita pertahun yang disesuaikan dimana di Kabupaten Purworejo pada tahun 2021 tercatat sebesar 10,28 juta rupiah.

https://purworejokab.bps.go.id

## INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN PURWOREJO 2017-2021

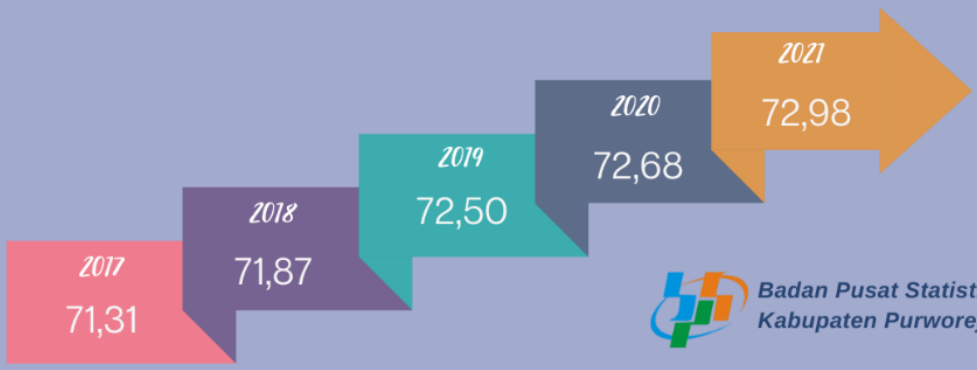


Badan Pusat Statistik
Kabupaten Purworejo

https://www.canva.com/design/DAExOTRDg3E/F3CKWAHgHE6qx3Q4r2HU5Q/edit

https://purworejokab.bps.go.id

# Status Pembangunan Manusia Kabupaten Purworejo

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Purworejo di tahun 2021 kembali meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya. Tercatat pada tahun 2021, IPM Kabupaten Purworejo sebesar 72,98. Capaian ini merupakan agregasi dari tiga dimensi, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Besaran ini menempatkan Kabupaten Purworejo sebagai penyandang status wilayah dengan pembangunan manusia dalam kelompok "tinggi".

Dari besarnya IPM Kabupaten Purworejo pada tahun yang sama tersebut, angka dari dimensi umur panjang dan hidup sehat, digunakan indikator angka harapan hidup saat lahir. Di tahun 2021, angka harapan hidup Kabupaten Purworejo sebesar 74,87, naik jika dibandingkan tahun 2020. Artinya, harapan hidup bayi yang baru lahir di Kabupaten Purworejo pada tahun 2021 dapat bertahan hidup secara rata-rata hingga usia 74,87 tahun. Hal ini juga merupakan indikasi semakin membaiknya kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Purworejo. Dimensi kedua sebagai pembentuk IPM adalah pengetahuan. Dimensi ini diwakili oleh rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Angka harapan lama sekolah Kabupaten Purworejo tahun yang sama mencapai 13,51 tahun. Rata-rata penduduk usia 7 tahun ke atas yang bersekolah diharapkan mampu menyelesaikan pendidikan hingga 13,51 tahun. Bila disamakan dengan rata-rata usia sekolah, penduduk Kabupaten Purworejo diharapkan mampu menyelesaikan jenjang pendidikan menengah atas. Sementara itu, rata-rata lama sekolah di tahun yang sama tercatat 8,21 tahun. Hal ini berarti, penduduk Kabupaten Purworejo usia 25 tahun ke atas telah menempuh jenjang pendidikan selama 8,21 tahun masa sekolah atau secara rata-rata telah menempuh pendidikan hingga Kelas 3 di Sekolah

Menengah Pertama. Dimensi terakhir untuk perhitungan IPM adalah standar hidup layak. Dimensi ini diwakili oleh indikator pengeluaran per kapita pertahun yang disesuaikan dan di tahun 2021 telah mencapai Rp. 10.275.000 per kapita per tahun. Dua dimensi pertama pembentuk IPM Kabupaten Purworejo meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dimensi terakhir pembentuk IPM juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya setelah sebelumnya sempat turun sebagai akibat dari penurunan daya beli masyarakat karena pandemi Covid-19. Dengan demikian, nilai IPM secara total yang mengalami kenaikan menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Kabupaten Purworejo lebih baik dari tahun ke tahun.

**Grafik 3. IPM Kabupaten Purworejo dan Komponen, 2021**

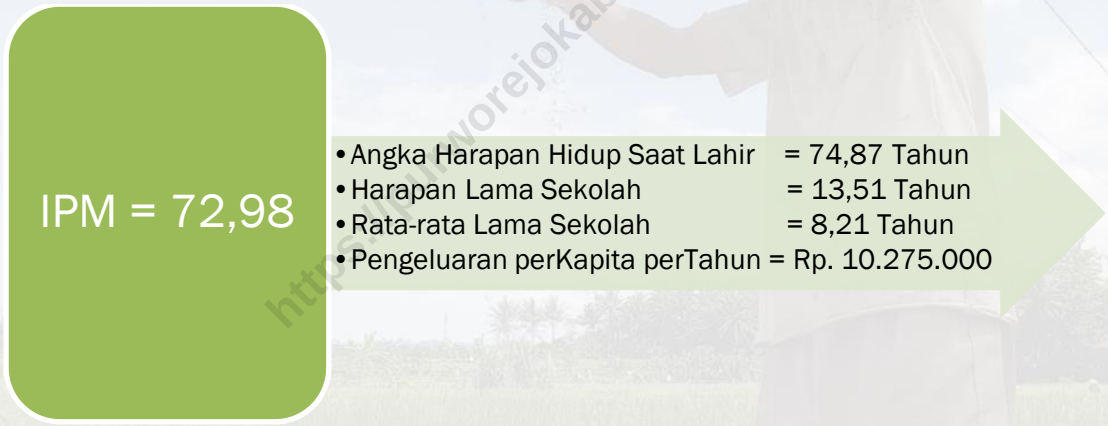


Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Dari tahun ke tahun, IPM Kabupaten Purworejo menunjukkan peningkatan. Bahkan semenjak tahun 2014, IPM Kabupaten Purworejo telah masuk dalam kategori tinggi yaitu pada angka diatas 70. Pada periode 2020-2021, IPM Kabupaten Purworejo tumbuh 0,41 persen atau meningkat 0,30 poin. Peningkatan ini menunjukkan terjadi perkembangan di tahun 2021 dalam hal pembangunan manusia di Kabupaten Purworejo jika dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun masih terdampak pandemi Covid-19, namun pertumbuhan IPM di tahun 2021 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi tren positif pemulihan pembangunan

manusia di Kabupaten Purworejo setelah sebelumnya sangat terdampak akibat pandemi ini. Peningkatan pada periode ini lebih tinggi dibandingkan dengan periode 2019-2020, yang hanya naik sebesar 0,18 poin, namun tetap masih lebih rendah dibanding periode 2018-2019 yang naik sebesar 0,63 poin. Di tahun 2012, IPM Kabupaten Purworejo tercatat sebesar 69,40. Selama periode 2012-2020, IPM Kabupaten Purworejo rata-rata tumbuh sebesar 0,56 persen per tahun. Semakin naiknya angka IPM ini menunjukkan pembangunan manusia di Kabupaten Purworejo semakin mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Seiring dengan kenaikan IPM, dimensi yang membentuknya semakin mengalami perbaikan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Setelah di tahun sebelumnya dimensi standar hidup layak di Kabupaten Purworejo mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 sebagai imbas pandemi, maka di tahun ini dimensi tersebut kembali menunjukkan perbaikan dibanding tahun 2020 meskipun masih lebih rendah dibanding tahun 2019. Hal ini menunjukkan harapan bayi baru lahir untuk dapat hidup semakin lama, rata-rata lama sekolah maupun harapan mengenyam bangku pendidikan juga semakin lama, serta standar hidup penduduk Kabupaten Purworejo semakin membaik.

**Grafik 4. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Purworejo, 2012-2021**

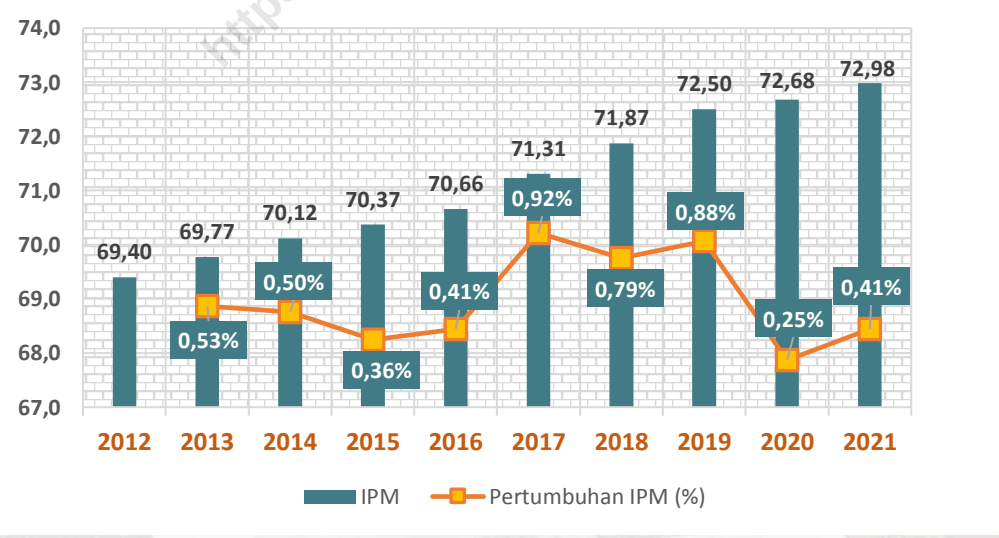


Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Pertumbuhan IPM menunjukkan perkembangan pembangunan manusia di suatu wilayah. Pertumbuhan yang positif mengindikasikan kenaikan IPM yang artinya terjadi perbaikan pembangunan manusia di wilayah tersebut. Pertumbuhan negatif menunjukkan sebaliknya, terjadi penurunan kualitas pembangunan manusia yang harus dicermati. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa IPM Kabupaten Purworejo semakin meningkat dalam sepuluh tahun terakhir. Ini berarti pertumbuhan IPM pun menunjukkan angka yang positif. Dalam hal pembangunan manusia di wilayah Kabupaten Purworejo, dari tahun ke tahun menunjukkan perbaikan yang cukup menggembirakan. Selama tahun 2012 sampai 2021, pertumbuhan IPM yang paling tinggi adalah pada periode tahun 2017 dibanding tahun 2016 yang tumbuh sebesar 0,65 poin atau 0,92 persen. Sementara itu, pertumbuhan IPM yang paling rendah adalah pada periode tahun 2020 terhadap 2019 yang hanya tumbuh sebesar 0,18 poin atau 0,25 persen.

Selain pertumbuhan, status pembangunan manusia merupakan cara lain untuk melihat perkembangan pembangunan manusia di suatu wilayah. Perubahan status pembangunan manusia bisa dijadikan acuan dalam membaca perkembangan pembangunan manusia. Badan Pusat Statistik mengelompokkan status pembangunan manusia bedasarkan IPM menjadi 4 kelompok yaitu:

- Sangat Tinggi : IPM ≥ 80
- Tinggi : 70 ≤ IPM < 80
- Sedang : 60 ≤ IPM < 70
- Rendah : IPM < 60

IPM terus meningkat dari tahun ke tahun dan status pembangunan manusia Kabupaten Purworejo pada tahun 2021 masuk dalam kelompok "tinggi". Melihat capaian sejak tahun 2014 hingga 2021, peluang Kabupaten Purworejo untuk tetap berada dalam kategori tinggi pada tahun-tahun

mendatang sangat besar. Hal ini merupakan modal awal bagi pemerintah untuk semakin banyak memberikan program-program yang bertujuan meningkatkan pembangunan manusia melalui kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang layak.

IPM mengukur pencapaian pembangunan manusia dengan tiga aspek esensial sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Oleh karena itu, peningkatan capaian IPM tidak terlepas dari peningkatan setiap komponen penyusunannya. Dalam satu dekade terakhir, peningkatan nilai indeks masing-masing komponen telah membuat IPM Kabupaten Purworejo terus meningkat dari tahun ke tahun. Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia juga berimbas pada pembangunan manusia khususnya di Purworejo. Tahun lalu, dimana pandemi ini masih sangat berdampak terlebih di perekonomian nasional, dimensi standar hidup layak mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2019. Hal ini dapat dipahami dari banyaknya masyarakat yang terdampak pandemi seperti misalnya terkena PHK atau terpaksa menurunkan standar pengeluarannya untuk mengimbangi menurunnya pendapatan. Dengan semakin terkendalinya pandemi ini, diharapkan tahun-tahun ke depan pembangunan manusia di Purworejo semakin menggeliat.

Umur panjang dan angka harapan hidup saat lahir (AHH) mewakili dimensi pertama pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Angka harapan hidup saat lahir merupakan indikator yang dapat mencerminkan derajat kesehatan suatu wilayah, baik dari sarana prasarana, akses, hingga kualitas kesehatan. Sejak tahun 2012, angka harapan hidup seorang bayi saat lahir di Kabupaten Purworejo semakin meningkat dari tahun ke tahun. Kondisi ini menunjukkan harapan hidup bagi bayi yang baru lahir semakin

besar karena membaiknya tingkat kesehatan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya kemajuan teknologi di bidang kesehatan, pengetahuan akan pentingnya menjaga kesehatan sejak bayi oleh keluarga dekat, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan serta kepedulian masyarakat terhadap gaya hidup sehat yang meningkat.

**Grafik 5. Angka Harapan Hidup Saat Lahir Kabupaten Purworejo, 2012-2021 (Tahun)**

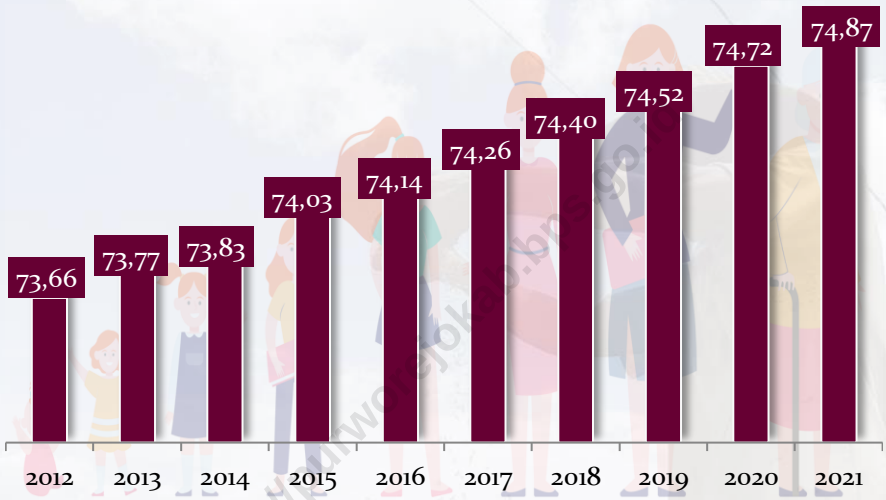


Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Dimensi pengetahuan dalam penghitungan IPM merupakan agregasi dari angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Angka harapan lama sekolah menghitung pendidikan dari usia 7 tahun ke atas, sedangkan rata-rata lama sekolah menghitung dari usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, pertumbuhan rata-rata lama sekolah lebih pesat jika dibandingkan pertumbuhan angka harapan lama sekolah jika dibandingkan dengan tahun 2020. Rata-rata lama sekolah di tahun 2021 tumbuh sebesar 1,11 persen jika

dibandingkan dengan tahun 2020. Sementara itu, angka harapan lama sekolah tumbuh sekitar 0,07 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Indikator ini merupakan indikator proses pembangunan sebagai ukuran keberhasilan program-program pendidikan jangka pendek. Di sisi lain, rata-rata lama sekolah menggambarkan indikator output pembangunan jangka panjang sehingga perkembangannya relatif lebih lambat. Kedua indikator ini menggambarkan capaian *(stock)* dan penambahan *(flow)* sumber daya manusia berkualitas di suatu wilayah.

**Grafik 6. Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Purworejo, 2012-2021 (Tahun)**

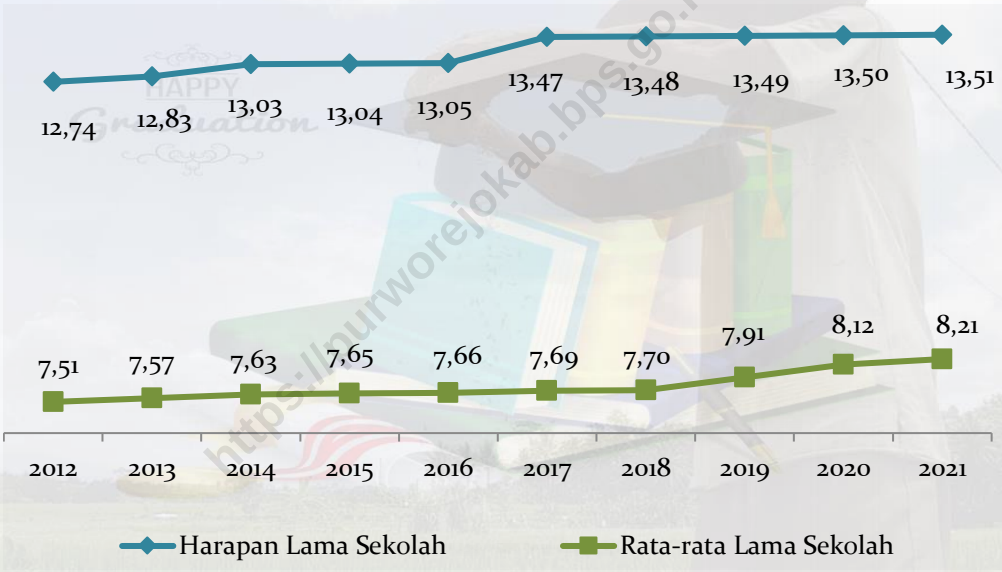


Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Tren angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah Kabupaten Purworejo meningkat dari tahun 2012 hingga 2021. Jika dibandingkan dengan tahun 2012, angka harapan lama sekolah di tahun 2021 tumbuh sebesar 6,04 persen dan pertumbuhan paling cepat dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir adalah di tahun 2017 yang tumbuh sebesar 3,21 persen dibandingkan tahun 2016. Meningkatnya Harapan Lama Sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk Kabupaten Purworejo yang bersekolah dengan capaian kelas yang semakin tinggi. Di tahun 2021, Harapan Lama

Sekolah telah mencapai 13,51 tahun, yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus SMA atau masuk ke perguruan tinggi minimal Diploma 2. Sementara itu untuk angka rata-rata lama sekolah dalam periode tahun 2021 tumbuh sebesar 9,32 persen bila dibandingkan dengan tahun 2012 lalu dan pertumbuhan paling cepat terjadi di tahun 2019 yang tumbuh sebesar 2,73 persen dibanding tahun sebelumnya. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia di Kabupaten Purworejo yang lebih baik. Hingga tahun 2021, secara rata-rata, penduduk Kabupaten Purworejo usia 25 tahun ke atas telah selesai mengenyam pendidikan kelas VIII (SMP kelas 2).

Pengeluaran perkapita pertahun mewakili dimensi standar hidup layak pada pembangun IPM. Di tahun 2021, pengeluaran per kapita per tahun Kabupaten Purworejo sebesar 10,28 juta rupiah. Angka tersebut naik sebesar 0,11 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pengeluaran perkapita pada tahun 2021 ini lebih tinggi dari nilai pada tahun 2020 yang mencapai Rp 10,16 juta pertahun namun masih lebih rendah dari tahun 2019 yang mencapai Rp 10,34 juta pertahun. Wabah Covid-19 yang melanda Kabupaten Purworejo mulai awal Maret 2020, telah menekan ekonomi dan berdampak pada menurunnya pendapatan sebagian penduduk Kabupaten Purworejo. Hal ini juga berimbas pada menurunnya pengeluaran rumah tangga secara umum di tahun 2020. Namun demikian, tahun 2021 berangsur-angsur perekonomian Kabupaten Purworejo mengalami perbaikan. Sektor-sektor ekonomi yang pada tahun 2020 lumpuh mulai menunjukkan geliatnya di tahun 2021.

Pengeluaran per kapita yang disesuaikan untuk Kabupaten Purworejo sejak tahun 2012 sampai dengan 2021 semakin meningkat tiap tahunnya kecuali di tahun 2020. Selama periode 2012-2021, pengeluaran perkapita masyarakat meningkat sekitar Rp 1,25 juta atau 13,89 persen. Secara rata-rata selama

periode tersebut terjadi peningkatan 1,47 persen pertahun. Pertumbuhan yang paling pesat terjadi di tahun 2018 dimana pada saat itu tercatat pertumbuhan pengeluaran per kapita sebesar 4,66 persen. Angka pengeluaran perkapita pertahun sebesar 10,28 juta rupiah jika diambil rata-rata perharinya pada tahun 2021, seorang penduduk mengeluarkan biaya sekitar 28,15 ribu rupiah untuk makan minum dan keperluan lainnya.

Naiknya pengeluaran dibandingkan tahun sebelumnya, menunjukkan semakin bertambahnya konsumsi yang dilakukan masyarakat setelah sebelumnya mengalami penurunan akibat hantaman pandemi. Semakin banyak biaya yang dikeluarkan setiap penduduk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dapat diartikan bahwa penduduk tersebut dapat menikmati lebih banyak barang dan jasa untuk menunjang kelangsungan hidupnya dibandingkan tahun sebelumnya. Begitu pula sebaliknya. Bila pengeluaran untuk konsumsi menurun, terdapat indikasi terjadi penurunan daya beli di masyarakat sehingga kesejahteraan mereka semakin berkurang. Melalui pendekatan pengeluaran inilah standar hidup atau kesejahteraan penduduk mampu diukur. Sebagai catatan pengeluaran perkapita di sini adalah pengeluaran per kapita dengan tahun dasar 2012 yang sudah disesuaikan antardaerah (pengeluaran per kapita disesuaikan).

**Grafik 7. Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan Kabupaten Purworejo, 2012-2021 (Ribu Rupiah/Tahun)**

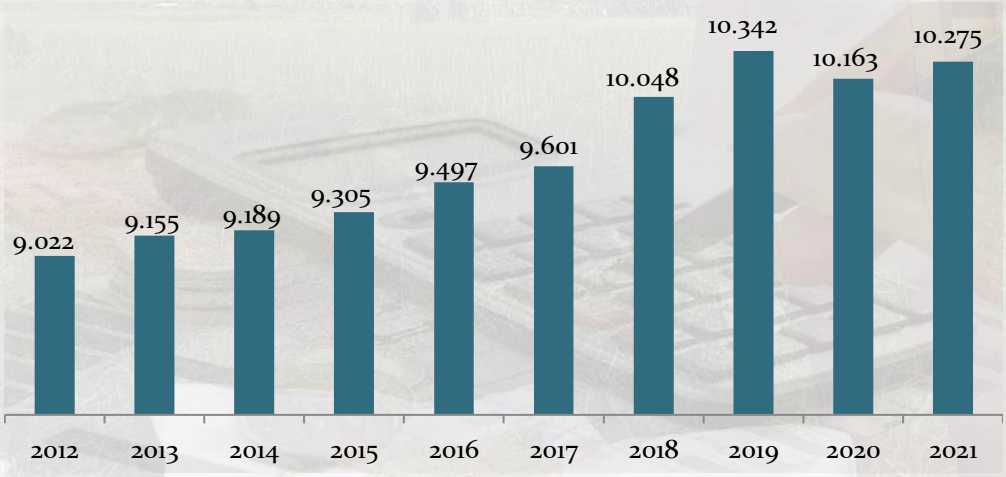


Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

https://purworejokab.bps.go.id

# Pencapaian Pembangunan Manusia Kabupaten Purworejo

## 1 DIBANDING JAWA TENGAH

Capaian IPM Purworejo selalu lebih tinggi dibanding IPM Provinsi Jawa Tengah sejak tahun 2012 hingga 2021.

## 2 IPM PURWOREJO & JATENG

Sejak tahun 2012, IPM Purworejo maupun Jawa Tengah terus mengalami peningkatan

## 3 PERINGKAT IPM PURWOREJO

Pembangunan manusia di Purworejo menduduki peringkat 14 dari 35 kabupaten/ kota di Jawa Tengah paa tahun 2021

## 4 DIMENSI IPM

Seluruh dimensi pembentuk IPM baik di Purworejo maupun Jawa Tengah mengalami peningkatan dibanding tahun 2020

Badan Pusat Statistik
Kabupaten Purworejo

https://www.canva.com/design/DAExlzXAnf4/U-7aPmV1ED_5ATgOO1RsKA/edit

https://purworejokab.bps.go.id

# Pencapaian Pembangunan Manusia Kabupaten Purworejo

Kabupaten Purworejo berada di wilayah selatan pulau Jawa dan masuk dalam Provinsi Jawa Tengah diantara 34 kabupaten/kota lainnya. Di sebelah timur berbatasan langsung dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pencapaian pembangunan manusia di Kabupaten Purworejo sejalan dengan pencapaian pembangunan manusia di Jawa Tengah secara keseluruhan. Sejak tahun 2012, IPM Kabupaten Purworejo maupun IPM Provinsi Jawa Tengah terus mengalami peningkatan. Selama periode sepuluh tahun terakhir, capaian pembangunan manusia Kabupaten Purworejo menduduki peringkat sekitar 13 hingga 14 dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Di tahun 2021, IPM Kabupaten Purworejo lebih tinggi dibandingkan IPM Provinsi Jawa Tengah.

**Grafik 8. Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Purworejo dan Provinsi Jawa Tengah, 2012-2021**

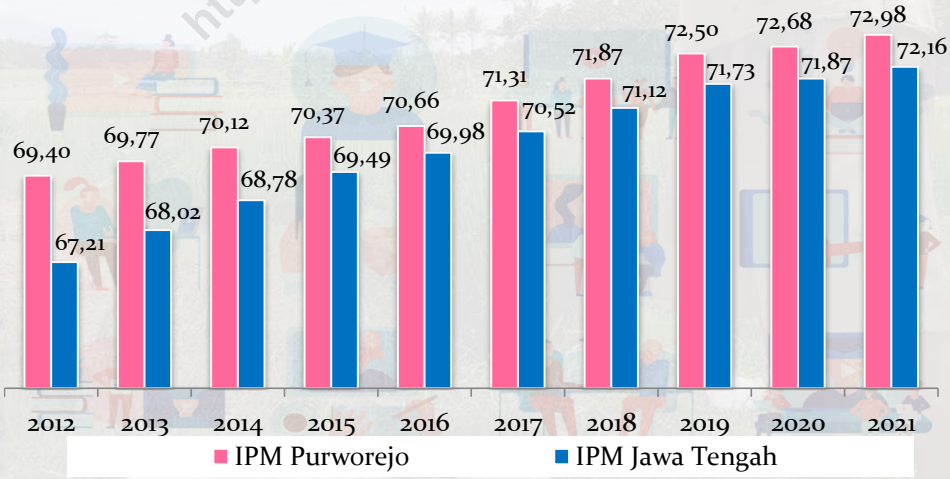


Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Pada tahun 2021, IPM Kabupaten Purworejo mencapai 72,98 dan masuk

dalam kategori IPM "tinggi". Sementara itu, IPM Provinsi Jawa Tengah di tahun yang sama tercatat sebesar 72,16 juga masuk dalam kategori IPM "tinggi". Capaian IPM tersebut menempatkan Kabupaten Purworejo pada peringkat ke-14 dari 35 kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah. Jika nilai IPM Kabupaten Purworejo telah memasuki kategori tinggi sejak tahun 2014, IPM Provinsi Jawa Tengah baru tergolong kategori tinggi di tahun 2017. Di tahun 2021, IPM Kabupaten Purworejo lebih tinggi 0,82 poin dibanding IPM Provinsi Jawa Tengah.

**Grafik 9. Angka Harapan Hidup Bayi Saat Lahir Kabupaten Purworejo dan Provinsi Jawa Tengah, 2012-2021 (Tahun)**

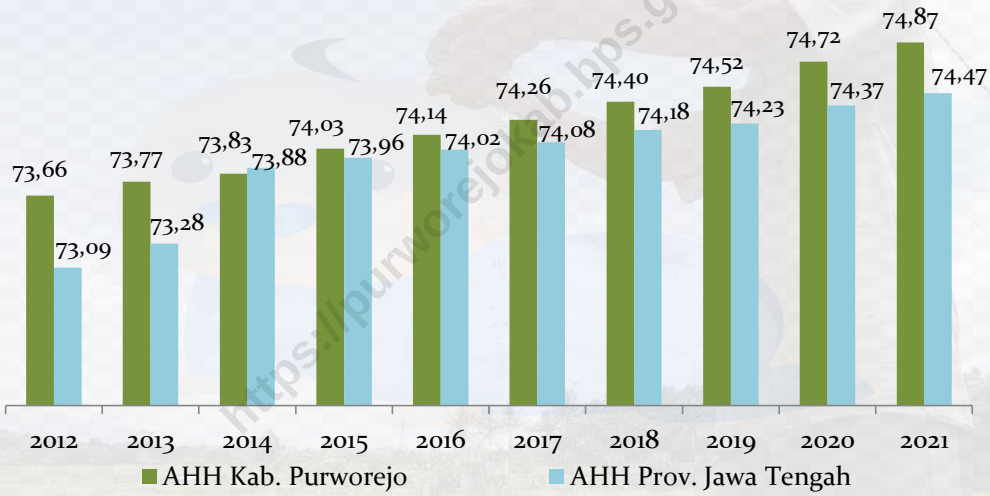


Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Dimensi kesehatan dalam pembentuk IPM diwakili oleh angka harapan hidup bayi saat lahir (AHH) dimana di tahun 2020 AHH Kabupaten Purworejo lebih tinggi dibandingkan AHH Provinsi Jawa Tengah. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, AHH Kabupaten Purworejo selalu lebih tinggi dari AHH Provinsi Jawa Tengah kecuali di tahun 2014 dimana AHH Kabupaten Purworejo sedikit di bawah dari AHH Provinsi Jawa Tengah. AHH tahun 2021 untuk Kabupaten Purworejo tercatat lebih tinggi 0,40 poin dari AHH Provinsi Jawa Tengah.

Dimensi pendidikan pembentuk IPM yang kedua adalah pendidikan yang

dapat diukur melalui indikator angka harapan lama sekolah (HLS) dan angka rata-rata lama sekolah (RLS). Dalam kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2021, angka harapan lama sekolah Kabupaten Purworejo selalu lebih tinggi dibandingkan HLS Provinsi Jawa Tengah. Namun dimikian, dalam kurun waktu tersebut rata-rata pertumbuhan HLS Kabupaten Purworejo masih lebih lambat dibandingkan rata-rata pertumbuhan HLS Provinsi Jawa Tengah. Angka Rata-rata Lama Sekolah atau RLS Kabupaten Purworejo dalam kurun waktu 2012 sampai dengan 2021 juga lebih tinggi dibanding RLS Provinsi Jawa Tengah. Seperti halnya HLS, rata-rata pertumbuhan RLS Kabupaten Purworejo masih lebih lambat dibandingkan rata-rata pertumbuhan RLS Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir.

**Grafik 10. Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Purworejo dan Provinsi Jawa Tengah, 2012-2021 (Tahun)**

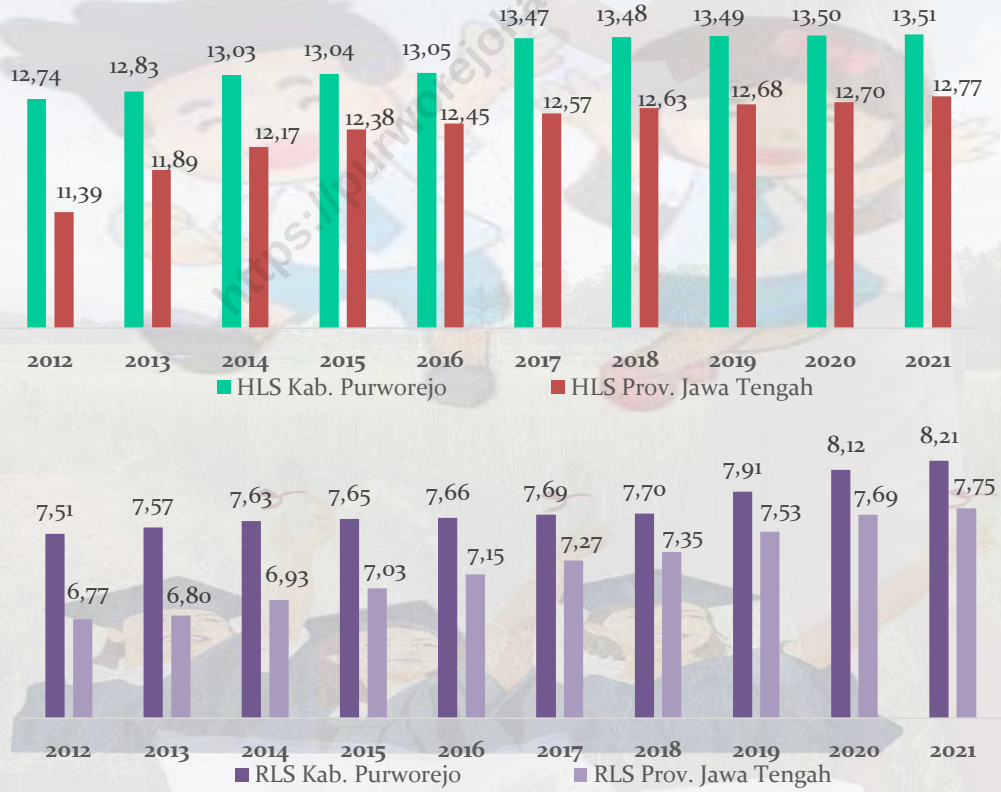


Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Dimensi terakhir pembentuk IPM adalah standar hidup layak yang dapat ditunjukkan melalui angka pengeluaran perkapita pertahun penduduk. Rata-rata pengeluaran perkapita pertahun seluruh penduduk Provinsi Jawa Tengah lebih tinggi jika dibandingkan rata-rata pengeluaran per kapita per tahun penduduk Kabupaten Purworejo selama sepuluh tahun terakhir. Di tahun 2021, pengeluaran perkapita penduduk Jawa Tengah sebesar 11,03 juta rupiah atau 759 ribu rupiah lebih tinggi dibandingkan pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Purworejo.

**Grafik 11. Pengeluaran per Kapita per Tahun Penduduk Kabupaten Purworejo dan Provinsi Jawa Tengah, 2012-2021 (Ribu Rupiah)**

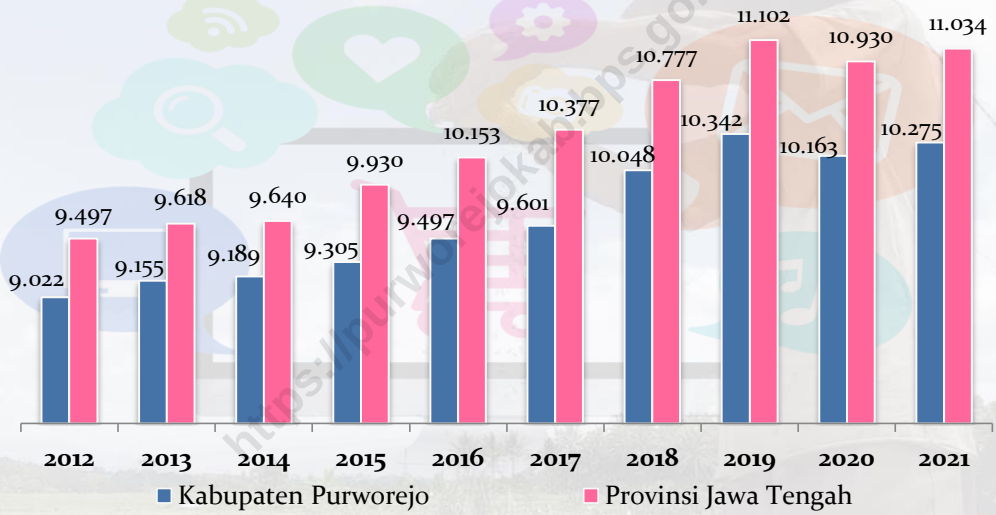


Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

# IPM KABUPATEN PURWOREJO RANKING 2 SE-KEDU

rangking pertama adalah Kota Magelang

https://purworejokab.bps.go.id

Badan Pusat Statistik
Kabupaten Purworejo

https://www.canva.com/design/DAExcae4lll/A5QKgY35GvXeXABY7zJzGA/edit

https://purworejokab.bps.go.id

# Kesenjangan Antarwilayah Eks Karesidenan Kedu

## Kesenjangan Pembangunan Manusia

Karesidenan adalah sebuah pembagian administratif dalam sebuah provinsi. Dalam satu karesidenan terdiri dari beberapa kabupaten/kota. Kabupaten Purworejo merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah Eks Karesidenan Kedu, yang meliputi Purworejo, Temanggung, Wonosobo, Kebumen, Kabupaten Magelang, dan Kota Magelang.

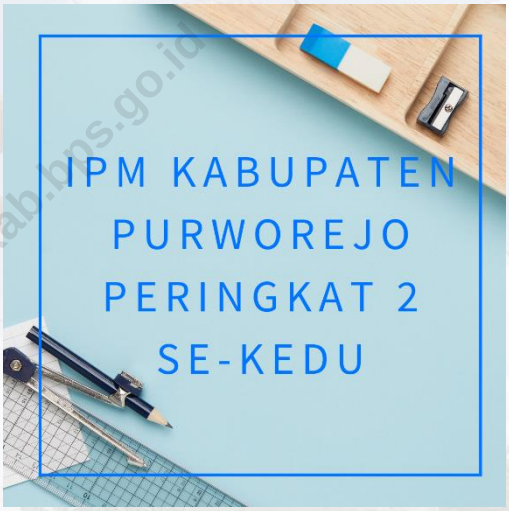


https://purworejokab.bps.go.id

IPM Kabupaten Purworejo menempati peringkat kedua se-eks Karesidenan Kedu setelah Kota Magelang. Secara total Provinsi Jawa Tengah, IPM Kabupaten Purworejo peringkat ke-14 sedangkan Kota Magelang peringkat ke-4. Sementara itu, Kabupaten Magelang peringkat ke-24, Kabupaten Kebumen peringkat ke-26, Kabupaten Temanggung peringkat ke-27, dan terakhir adalah Kabupaten Wonosobo yang merupakan peringkat ke-32 dari total 35 kabupaten/kota. Selisih IPM antara Kota Magelang (sebagai peringkat pertama se-eks Karesidenan Kedu) dengan Kabupaten Wonosobo (sebagai peringkat terakhir se-eks Karesidenan Kedu) adalah sebesar 11,00 poin. Nilai IPM tahun 2021 dari seluruh kabupaten/kota yang ada di wilayah se-eks Karesidenan Kedu mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan nilai IPM pada tahun 2020

**Grafik 12. Perkembangan Selisih IPM Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Kedu yang Tertinggi dan Terendah, 2012-2021**

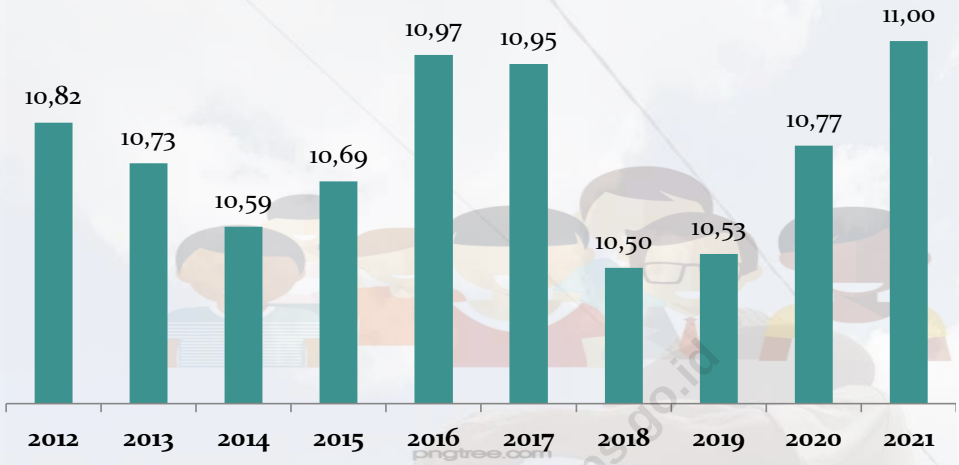


Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Perkembangan selisih IPM tertinggi dengan terendah wilayah se-eks Karesidenan Kedu selama sepuluh tahun terakhir berada pada kisaran 10 hingga 11 poin. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, selisih IPM tersebut melebar sebesar 0,23 poin. Hal ini mengindikasikan bahwa kesenjangan pembangunan manusia di Kabupaten Wonosobo dengan Kota Magelang masih cukup jauh. Namun demikian, jika melihat dalam kurun waktu tahun 2012-2021 dimana selisih IPM berfluktuatif, bukan tidak mungkin tahun selanjutnya akan kembali berkurang selisih tersebut.

## Kesenjangan Kesehatan Manusia

Dimensi kesehatan merupakan penjabaran dari angka harapan hidup bayi saat lahir yang menggunakan data jumlah anak lahir hidup dan anak masih hidup. Di tahun 2021, angka harapan hidup Kota Magelang merupakan yang tertinggi se-wilayah Eks Karesidenan Kedu sementara itu Kabupaten Wonosobo merupakan yang terendah. Selisih angka harapan hidup antara Kota Magelang dan Kabupaten Wonosobo tersebut adalah sebesar 4,99 poin. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir selisih tersebut semakin mengecil, hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan dimensi kesehatan antara wilayah di wilayah Eks Karesidenan Kedu semakin menyempit.

**Grafik 13. Perkembangan Selisih Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Kedu yang Tertinggi dan Terendah, 2012-2021 (Tahun)**

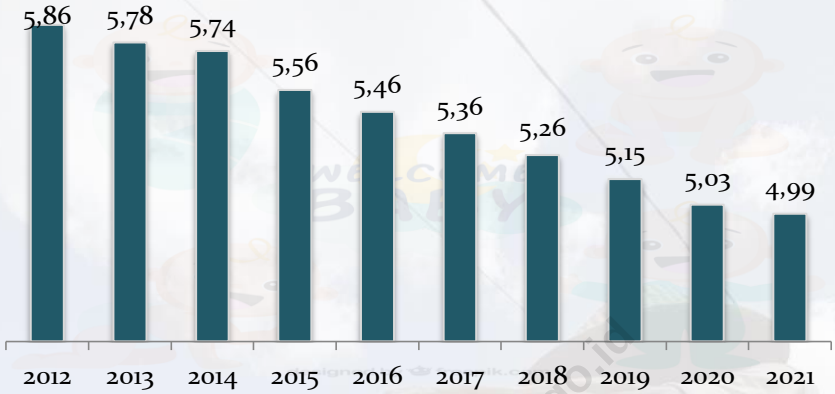


Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Tren selisih AHH tertinggi dengan terendah yang semakin mengecil menunjukkan perbedaan kualitas kesehatan dari daerah yang paling tinggi dengan paling rendah semakin berkurang. Perbaikan di bidang kesehatan semakin menjadi perhatian baik oleh pemerintah maupun masyarakatnya. Pemerintah melalui program-program yang diberikan diharapkan mampu secara langsung berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Masyarakat pun demikian, dengan semakin terbukanya akses informasi baik melalui media elektronik maupun sosialisasi langsung oleh pemerintah diharapkan semakin teredukasi perihal menjaga dan berperilaku hidup sehat. Masyarakat semakin sadar pentingnya menjaga kesehatan semenjak janin dalam kandungan sampai dengan lahir hidup dan dapat berkembang dengan baik hingga berumur paling tidak selama 71 tahun.

Tolak ukur berkurangnya kesenjangan antar wilayah khususnya untuk kualitas kesehatan cukup menjadi perhatian. Sinergi antara pemerintah dan kesadaran masyarakat tersebut yang pada akhirnya mampu memperbaiki kualitas kesehatan wilayah kabupaten/kota eks Karesidenan Kedu sehingga kesenjangan bidang kesehatan semakin mengecil dari tahun ke tahun.

## Kesenjangan Pendidikan

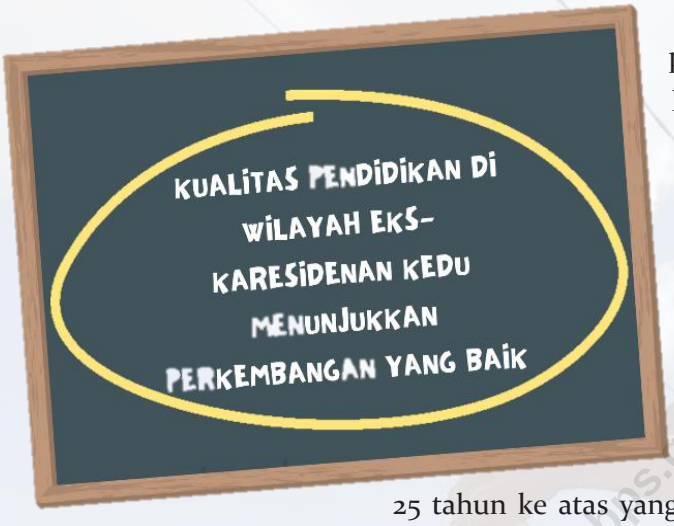


Sejalan dengan perbaikan kualitas kesehatan, dalam kurun waktu 2012-2021. Harapan lama sekolah penduduk usia 7 tahun ke atas semakin meningkat (ditunjukkan dengan angka HLS). Begitu pula dengan rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas yang semakin meningkat dari tahun ke tahun (ditunjukkan dengan angka RLS).

Angka harapan lama sekolah penduduk di kabupaten/kota se-Eks Karesidenan Kedu berkisar antara 11 dan 14 tahun. Kota Magelang masih merupakan daerah dengan angka harapan lama sekolah (HLS) yang paling tinggi dibandingkan kabupaten lain sedangkan Kabupaten Wonosobo yang paling rendah. Di tahun 2021, HLS Kota Magelang mencapai 14,15 tahun sementara Kabupaten Wonosobo adalah 11,76 tahun. Hal ini mengindikasikan penduduk usia 7 tahun ke atas di Kota Magelang berpotensi lebih lama mengenyam bangku pendidikan dibanding penduduk usia 7 tahun ke atas di Kabupaten Wonosobo. Perkembangan selisih tersebut masih mungkin terjadi jika melihat pola selisih setiap tahunnya.

Kesenjangan angka HLS pada tahun 2020 dan 2021 merupakan yang tertinggi antara wilayah dengan nilai HLS tertinggi dengan yang memiliki nilai HLS terendah se-Eks Karesidenan Kedu. Kesenjangan ini lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan semakin lebarnya jarak dimensi pendidikan dari Kota Magelang dengan Kabupaten Wonosobo di tahun 2021 bila dibandingkan dengan tahun 2020. Selisih ini sama kondisinya yang terjadi di tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun 2019.

**Grafik 14. Perkembangan Selisih Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Kedu yang Tertinggi dan Terendah, 2012-2021**

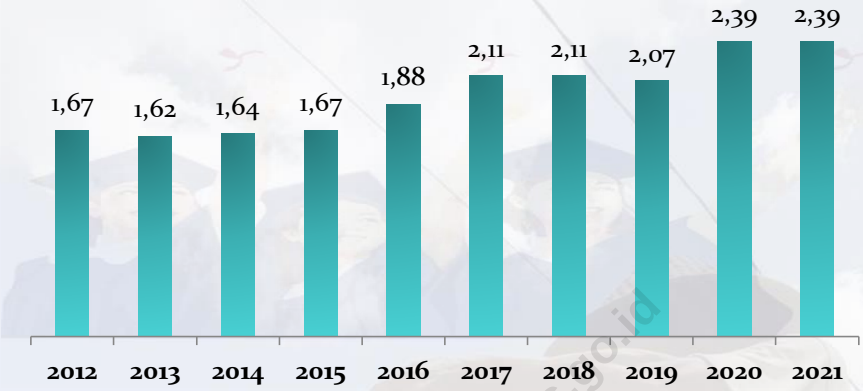


Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Sementara itu, perkembangan selisih angka rata-rata lama sekolah (RLS) untuk kota Magelang sebagai wilayah dengan RLS tertinggi se-Eks Karesidenan Kedu dengan Kabupaten Wonosobo sebagai wilayah dengan RLS terendah hampir sama setiap tahunnya. Hanya saja sejak tahun 2017 selisih ini semakin mengecil. Namun di tahun 2021, selisih tersebut kembali melebar yang tercatat sebesar 3,80 tahun.

**Grafik 15. Perkembangan Selisih Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Kedu yang Tertinggi dan Terendah, 2012-2021 (Tahun)**

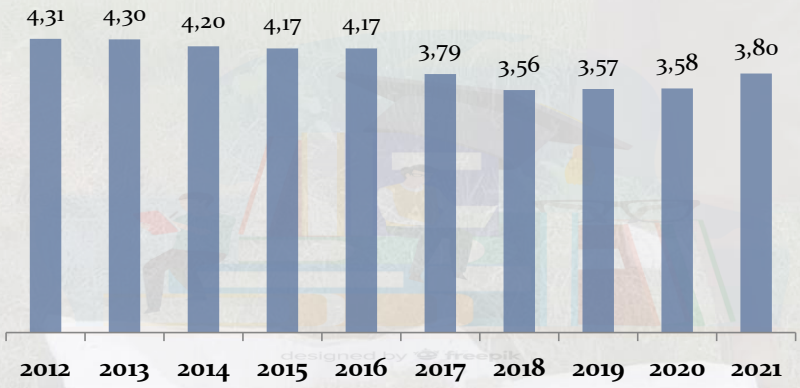


Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Seperti halnya kesenjangan angka harapan lama sekolah, kesenjangan rata-rata lama sekolah di Eks Karesidenan Kedu juga diakibatkan perbedaan capaian antara Kota Magelang dengan Kabupaten Wonosobo. Di tahun 2021, RLS Kota Magelang adalah sebesar 10,62 tahun sedangkan Kabupaten Wonosobo sebesar 6,82 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Kota Magelang yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama kurang lebih 10 tahun sementara secara rata-rata penduduk di Kabupaten Wonosobo selama hampir 7 tahun.

### Kesenjangan Pengeluaran per Kapita

Standar hidup layak sebagai dimensi terakhir pembentuk IPM diwakili oleh indikator pengeluaran per kapita per tahun. Besarnya pengeluaran untuk mencukupi kebutuhannya menjadi tolak ukur sejahtera atau tidaknya penduduk tersebut. Semakin besar biaya yang dikeluarkan penduduk, semakin terpenuhi pula kebutuhan untuk kelangsungan hidupnya. Semakin terpenuhi kebutuhan hidup, semakin baik pula kualitas hidup penduduk tersebut. Tinggi rendahnya kebutuhan akan konsumsi penduduk tersebut sangat dipengaruhi oleh karakteristik wilayah yang didiaminya.

Selama kurun waktu tahun 2012 sampai 2021 pengeluaran perkapita penduduk di wilayah Eks Karesidenan Kedu semakin meningkat. Hanya saja, akibat pandemi Covid-19 pengeluaran perkapita penduduk seluruh wilayah di Eks Karesidenan Kedu di tahun 2020 mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2019. Di tahun 2021, pengeluaran tersebut kembali naik meskipun masih lebih rendah jika dibandingkan tahun 2019. Namun hal ini sudah menjadi tanda perbaikan perekonomian di wilayah se-Eks Karesidenan Kedua. Kesenjangan antara wilayah dengan pengeluaran perkapita penduduk tertinggi dengan terendah masih terjadi. Kesenjangan ini ditunjukkan dengan selisih antara wilayah dengan rata-rata pengeluaran per kapita tertinggi dengan terendah. Kota Magelang masih menjadi wilayah dengan indikator IPM tertinggi khususnya untuk dimensi standar hidup layak yang ditunjukkan dengan pengeluaran per kapita per tahun sebesar 12,35 juta rupiah di tahun 2021. Sementara itu Kabupaten Kebumen tercatat sebagai wilayah dengan pengeluaran perkapita pertahun terendah yaitu sebesar 9,03 juta rupiah.

**Grafik 16. Perkembangan Selisih Pengeluaran per Kapita per Tahun Kabupaten/Kota Wilayah Eks Karesidenan Kedu yang Tertinggi dan Terendah, 2012-2021 (Juta Rupiah)**

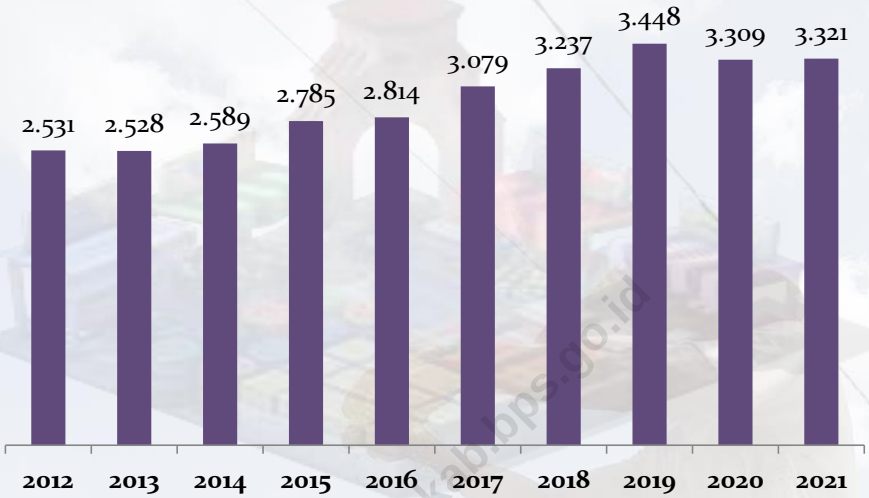


Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Terlihat bahwa di tahun 2021 kesenjangan antara wilayah dengan pengeluaran perkapita penduduk pertahun yang tertinggi dengan yang terendah menunjukkan kenaikan kembali jika dibandingkan tahun 2020. Namun demikian, seluruh kabupaten/ kota di wilayah Eks Karesidenan Kedu mengalami kenaikan konsumsi masyarakat akibat mulai menggeliatnya perekonomian setelah sebelumnya dihantam pandemi Covid-19. Meskipun masih lebih rendah dari tahun 2019 atau belum sepenuhnya kembali seperti pada saat sebelum pandemi, namun hal ini sudah menjadi sinyal positif bagi wilayah se-Eks Karesidenan Kedu untuk semakin melangkah memperbaiki perekonomian.

https://purworejokab.bps.go.id

https://purworejokab.bps.go.id

# KESIMPULAN

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) KABUPATEN PURWOREJO SEMAKIN MENINGKAT DARI TAHUN 2012 SAMPAI DENGAN 2021 MESKIPUN SEMPAT TERJADI PANDEMI COVID-19

DIMENSI STANDAR HIDUP LAYAK YANG TAHUN SEBELUMNYA MENGALAMI PENURUNAN, TAHUN 2021 KEMBALI NAIK MESKIPUN MASIH LEBIH RENDAH DARI TAHUN 2019

https://purworejokab.bps.go.id

BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PURWOREJO

https://www.canva.com/design/DAExbae4lll/A5QKgY35GvXeXABY7zJzGA/edit

https://purworejokab.bps.go.id

# Kesimpulan

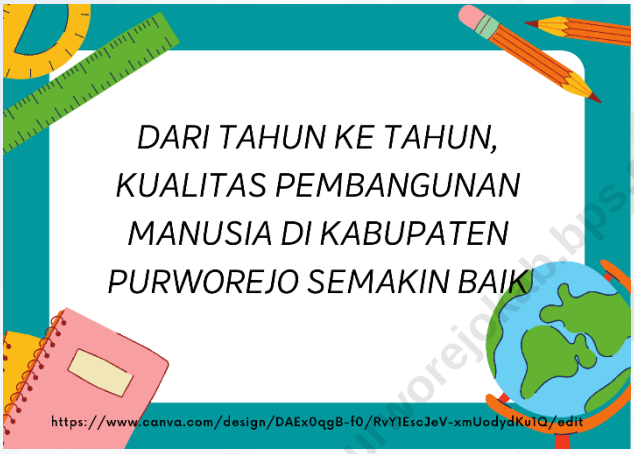


Dari hasil pengamatan data dan publikasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Purworejo tahun 2021, diperoleh beberapa kesimpulan antara lain:

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Purworejo sejak tahun 2012 hingga 2021 terus meningkat dan telah masuk kategori "tinggi" sejak tahun 2014.
2. Meningkatnya IPM Kabupaten Purworejo juga diikuti dengan peningkatan seluruh dimensi pembentuk IPM yaitu sebagai berikut:
   a. Angka Harapan Hidup (AHH) di tahun 2021 tumbuh 0,20 persen yaitu sebesar 74,87 tahun dibanding tahun 2020 yaitu 74,72 tahun.
   b. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di tahun 2021 tumbuh 0,07 persen yaitu sebesar 13,51 tahun dibanding tahun 2020 yaitu 13,50 tahun.
   c. Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di tahun 2021 tumbuh 1,11 persen yaitu sebesar 8,21 tahun dibanding tahun 2020 yaitu 8,12 tahun.
   d. Pengeluaran perkapita pertahun yang disesuaikan di tahun 2021 kembali naik sebesar 1,10 persen yaitu sebesar 10,28 juta rupiah dibanding tahun 2020 yaitu 10,16 juta rupiah. Kenaikan sebagai sinyal positif perbaikan pembangunan manusia sebagai imbas dari pandemi Covid-19 yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia khususnya

Kabupaten Purworejo sehingga setelah sebelumnya menekan ekonomi dan berdampak pada menurunnya pendapatan sebagian penduduk Kabupaten Purworejo, di tahun 2021 kembali mengalami perbaikan.

3. IPM Kabupaten Purworejo tahun 2021 adalah 72,98 dan merupakan yang tertinggi kedua setelah Kota Magelang se-Eks Karesidenan Kedu dan menduduki peringkat 14 dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.

https://purworejokab.bps.go.id

# LAMPIRAN

https://purworejokab.bps.go.id

**Lampiran 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Komponen Pembentuknya Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, 2020 – 2021**

| Provinsi/ Kab/ Kota | UHH | | HLS | | RLS | | Pengeluaran perkapita | | IPM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| **JAWA TENGAH** | **74,37** | **74,47** | **12,70** | **12,77** | **7,69** | **7,75** | **10.930** | **11.034** | **71,87** | **72,16** |
| Cilacap | 73,73 | 73,90 | 12,50 | 12,63 | 6,97 | 7,09 | 10.440 | 10.534 | 69,95 | 70,42 |
| Banyumas | 73,72 | 73,80 | 12,85 | 13,03 | 7,52 | 7,63 | 11.448 | 11.546 | 71,98 | 72,44 |
| Purbalingga | 73,14 | 73,21 | 11,99 | 12,00 | 7,24 | 7,25 | 9.914 | 10.032 | 68,97 | 69,15 |
| Banjarnegara | 74,18 | 74,28 | 11,46 | 11,63 | 6,74 | 6,75 | 9.263 | 9.407 | 67,45 | 67,86 |
| Kebumen | 73,40 | 73,55 | 13,34 | 13,35 | 7,54 | 7,55 | 8.901 | 9.028 | 69,81 | 70,05 |
| Purworejo | 74,72 | 74,87 | 13,50 | 13,51 | 8,12 | 8,21 | 10.163 | 10.275 | 72,68 | 72,98 |
| Wonosobo | 71,82 | 71,94 | 11,75 | 11,76 | 6,81 | 6,82 | 10.621 | 10.760 | 68,22 | 68,43 |
| Magelang | 73,72 | 73,88 | 12,54 | 12,55 | 7,78 | 7,79 | 9.301 | 9.440 | 69,87 | 70,12 |
| Temanggung | 75,58 | 75,64 | 12,14 | 12,32 | 7,24 | 7,25 | 9.343 | 9.408 | 69,57 | 69,88 |
| Kendal | 74,43 | 74,48 | 12,95 | 12,96 | 7,45 | 7,46 | 11.425 | 11.608 | 72,29 | 72,50 |
| Batang | 74,69 | 74,74 | 12,01 | 12,13 | 6,87 | 6,88 | 9.431 | 9.524 | 68,65 | 68,92 |
| Pekalongan | 73,69 | 73,74 | 12,41 | 12,42 | 6,91 | 7,17 | 10.312 | 10.409 | 69,63 | 70,11 |
| Pemalang | 73,40 | 73,53 | 11,95 | 11,96 | 6,42 | 6,45 | 8.461 | 8.573 | 66,32 | 66,56 |
| Tegal | 71,60 | 71,72 | 12,67 | 12,89 | 6,98 | 6,99 | 9.612 | 9.700 | 68,39 | 68,79 |
| Brebes | 69,33 | 69,54 | 12,04 | 12,05 | 6,21 | 6,22 | 10.058 | 10.152 | 66,11 | 66,32 |
| Kota Magelang | 76,85 | 76,93 | 14,14 | 14,15 | 10,39 | 10,62 | 12.210 | 12.349 | 78,99 | 79,43 |
| Kota Surakarta | 77,22 | 77,32 | 14,87 | 14,88 | 10,69 | 10,90 | 14.761 | 14.911 | 82,21 | 82,62 |
| Kota Salatiga | 77,40 | 77,55 | 15,41 | 15,42 | 10,42 | 10,66 | 15.699 | 15.843 | 83,14 | 83,60 |
| Kota Semarang | 77,34 | 77,51 | 15,52 | 15,53 | 10,53 | 10,78 | 15.243 | 15.425 | 83,05 | 83,55 |
| Kota Pekalongan | 74,38 | 74,44 | 12,84 | 12,85 | 8,96 | 9,18 | 12.467 | 12.598 | 74,98 | 75,40 |
| Kota Tegal | 74,46 | 74,54 | 13,05 | 13,07 | 8,51 | 8,73 | 12.999 | 13.143 | 75,07 | 75,52 |

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

## Lampiran 2. Komoditi Kebutuhan Pokok sebagai Dasar Penghitungan Daya Beli (PPP)

| | | |
|---|---|---|
| Beras | Pisang lainnya | Rokok kretek tanpa filter |
| Tepung terigu | **Pepaya** | Rokok putih |
| Ketela pohon/singkong | **Minyak kelapa** | Rumah sendiri/bebas sewa |
| Kentang | **Minyak goreng lainnya** | Rumah kontrak |
| Tongkol/tuna/cakalang | **Kelapa** | Rumah sewa |
| Kembung | **Gula pasir** | Rumah dinas |
| Bandeng | **Teh** | Listrik |
| Mujair | **Kopi** | Air PAM |
| Mas | **Garam** | LPG |
| Lele | **Kecap** | Minyak tanah |
| Ikan segar lainnya | **Penyedap masakan/vetsin** | Lainnya(batu baterai,aki,korek,obat nyamuk dll) |
| Daging sapi | **Mie instan** | Perlengkapan mandi |
| Daging ayam ras | **Roti manis/roti lainnya** | Barang kecantikan |
| Daging ayam kampung | **Kue kering** | Perawatan kulit,muka,kuku,rambut |
| Telur ayam ras | **Kue basah** | Sabun cuci |
| Susu kental manis | **Makanan gorengan** | Biaya RS Pemerintah |
| Susu bubuk | **Gado-gado/ketoprak** | Biaya RS Swasta |
| Susu bubuk bayi | **Nasi campur/rames** | Puskesmas/pustu |
| Bayam | **Nasi goreng** | Praktek dokter/poliklinik |
| Kangkung | **Nasi putih** | SPP |
| Kacang panjang | **Lontong/ketupat sayur** | Bensin |
| Bawang merah | **Soto/gule/sop/rawon/cincang** | Transportasi/pengangkutan umum |
| Bawang putih | **Sate/tongseng** | Pos dan Telekomunikasi |
| Cabe merah | **Mie bakso/mie rebus/mie goreng** | Pakaian jadi laki-laki dewasa |
| Cabe rawit | **Makanan ringan anak** | Pakaian jadi perempuan dewasa |
| Tahu | **Ikang (goreng/bakar dll)** | Pakaian jadi anak-anak |
| Tempe | **Ayam/daging (goreng dll)** | Alas kaki |
| Jeruk | **Makanan jadi lainnya** | Minyak Pelumas |
| Mangga | **Air kemasan galon** | Meubelair |
| Salak | **Minuman jadi lainnya** | Peralatan Rumah Tangga |
| Pisang ambon | **Es lainnya** | Perlengkapan perabot rumah tangga |
| Pisang raja | Rokok kretek filter | Alat-alat Dapur/Makan |

https://purworejokab.bps.go.id

## Lampiran 3. Nilai Maksimum dan Minimum dari Setiap Komponen IPM

| Komponen IPM | Satuan | Minimum | Maksimum |
|---|---|---|---|
| Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH) | **Tahun** | **20** | 85 |
| Harapan Lama Sekolah (HLS) | **Tahun** | **0** | 18 |
| Rata-rata Lama Sekolah (RLS) | **Tahun** | **0** | 15 |
| Pengeluaran per Kapita | Rupiah | 1.007.436 | 26.572.352 |

Keterangan:

* Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris) yaitu di Tolikara - Papua

** Daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2025 (akhir RPJPN) yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta Selatan tahun 2025

https://purworejo.kab.bps.go.id

# DATA
## MENCERDASKAN BANGSA

Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo

Jalan Pangeran Joyo Kusumo, Banyuurip, Purworejo, 54111

Telp (0275) 321218, Faks (0275) 321218

https://purworejokab.bps.go.id/, email: bps3306@bps.go.id